

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Pemerintah dituntut untuk dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan administrasi pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan anggaran.

Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting, sehingga proses penyusunan anggaran merupakan aspek penting dalam pencapaian keberhasilan dari suatu organisasi. Menurut Deddi (2007) dalam Wulandari (2013) kegunaan anggaran adalah sebagai alat penilaian kinerja, artinya anggaran merupakan suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/ unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran yang

dinamakan dengan partisipasi anggaran. Anggaran yang disusun secara partisipatif merupakan cara efektif untuk memotivasi kinerja bawahan (Hofstede, 1968 dalam Prihandini, 2011). Partisipasi anggaran melibatkan bawahan dalam proses penyusunannya, sehingga bawahan yang kinerjanya diukur berdasarkan anggaran akan termotivasi untuk mencapai kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran diperlukan agar anggaran yang dibuat bisa lebih sesuai dengan realita yang ada dilapangan. Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan pendekatan manajerial yang umumnya dinilai dapat meningkatkan kinerja manajerial.

Bangun (2009) dalam tulisannya mengatakan perencanaan anggaran harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu bagian penting dari karakteristik tujuan anggaran. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Putra (2013) dalam tulisannya mengatakan dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang, dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak

termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis, 1979 dalam Syafrial, 2009).

Mahsun *et al.* (2011) dalam bukunya mengatakan bahwa tiga prinsip utama yang mendasari penerapan *good governance* adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik sebagai bagian dari terciptanya *good governance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan berjalan seiring dengan semakin luasnya sistem pemerintahan yang berbasis otonomi daerah di Indonesia. Menanggapi tuntutan akan perlunya akuntabilitas publik, pemerintah Indonesia telah melakukan usaha dengan membuat peraturan-peraturan yang mendukung terselenggaranya akuntabilitas bagi pemerintah daerah. Setiawan (2012) dalam tulisannya menyebutkan bahwa akuntabilitas oleh pemerintah daerah sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Sopanah dan Wahyudi (2010) menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian dan kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Penelitian mengenai partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja masih menunjukkan hasil yang bertentangan. Hasil penelitian Jalaluddin dan Bahri (2009), Bangun (2009), Prihandini (2011), dan Wulandari (2013)

menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Anggraeni (2009) yang meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD pemerintah kabupaten Kota Labuhan Batu. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa secara parsial maupun simultan tidak terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD pemerintah daerah Kota Labuhan Batu. Nugrahani (2009) juga meneliti mengenai pengaruh partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan *self-efficacy* terhadap kinerja manajerial di Yogyakarta. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa partisipasi anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Yogyakarta.

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan acuan Putra (2013) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian yang sama akan digunakan dengan menambahkan satu variabel baru yaitu partisipasi penyusunan anggaran. Alasan dipilihnya variabel tersebut karena penelitian mengenai partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja masih menunjukkan hasil yang bertentangan.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil obyek penelitian di kantor dinas pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat. Alasan dipilihnya kantor

dinas pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai obyek penelitian karena berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan SKPD Kabupaten Manggarai Barat menyebutkan bahwa kinerja SKPD lingkup pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat belum sepenuhnya optimal. Hal ini dibuktikan dari progres penyerapan APBD per September 2013 baru menyerap 30% dari yang seharusnya sudah harus mencapai rata-rata 75% (Sumber: BAPPEDA Kabupaten Manggarai Barat, 2013). Berdasarkan laporan diatas, penulis ingin melihat apakah kinerja yang belum sepenuhnya optimal tersebut bisa dipengaruhi oleh tingkat partisipasi, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis termotivasi untuk membuat penelitian dengan judul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok - pokok pikiran di atas, maka permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah ?
2. Apakah terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah?

3. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan menambahkan variabel partisipasi penyusunan anggaran sebagai variabel baru dalam penelitian ini. Alasan dipilihnya variabel tersebut karena penelitian mengenai partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja masih menunjukkan hasil yang bertentangan. Penelitian ini juga mengambil obyek penelitian yang berbeda dari peneliti sebelumnya yaitu kantor dinas pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Manggarai Barat karena berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan SKPD Kabupaten Manggarai Barat menyebutkan bahwa kinerja SKPD lingkup pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat belum sepenuhnya optimal. Untuk itu, penulis ingin melihat apakah kinerja yang belum sepenuhnya optimal tersebut bisa dipengaruhi oleh tingkat partisipasi, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan mengenai keuangan daerah, khususnya dalam kaitannya dengan partisipasi

penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

2. Kontribusi Praktek

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat melalui partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yaitu anggaran, partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, akuntabilitas publik, kinerja pemerintah daerah, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan teknik pengumpulan data, obyek, populasi dan teknik pengambilan sampel, operasionalisasi variabel, model penelitian, analisis data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Bab IV : Analisis Data

Bab ini membahas mengenai analisis data serta membahas jawaban responden dari kuisisioner yang telah dibagikan.

Bab V : Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran-saran yang diajukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.